



CELIOS



RAPOR 100 HARI PRABOWO-GIBRAN

**Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi,
Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum**

Media Wahyudi Askar • Bhima Yudhistira Adhinegara • Galau D Muhammad
Bakhrul Fikri • Jaya Darmawan • Muhamad Saleh

RAPOR 100 HARI PRABOWO-GIBRAN

Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi,
Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum

Penulis

Media Wahyudi Askar
Bhima Yudhistira Adhinegara
Galau D Muhammad
Bakhrul Fikri
Jaya Darmawan
Muhamad Saleh

Penata Desain

Mazdan Maftukha Assyayuti

Penerbit

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Jakarta, Indonesia

Tentang CELIOS

CELIOS (Center of Economic and Law Studies) adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. CELIOS memiliki dedikasi untuk mendorong reformasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, menciptakan ekonomi rendah karbon dan pelibatan aktif dari masyarakat terdampak pembangunan.

Hak Cipta

© 2025 CELIOS
Celios memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id.

Kutipan

Seluruh isi dari publikasi yang diterbitkan oleh CELIOS bebas untuk dikutip sepanjang mencantumkan sumber.

Foto Sampul

KompasPedia, 2024.

Daftar Isi

Temuan Utama

1

Latar Belakang

2

Metodologi Penelitian

4

Evaluasi Kinerja Kabinet Prabowo
Gibran

16

Resolusi Perbaiki Kinerja Kabinet



Temuan Utama

100 Hari dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo – Gibran

Menteri Berkinerja Terburuk

Kinerja Terburuk #1	Kinerja Terburuk #2	Kinerja Terburuk #3	Kinerja Terburuk #4	Kinerja Terburuk #5
Natalius Pigai Menteri HAM	Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi	Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan	Yandri Susanto Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal
				
-113 poin	-61 poin	-41 poin	-36 poin	-28 poin

Menteri yang perlu di-reshuffle

#1	#2	#3	#4	#5
Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan	Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi	Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Natalius Pigai Menteri HAM	Yandri Susanto Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal
				
56 poin	48 poin	46 poin	41 poin	26 poin

Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja

#1	#2	#3	#4	#5
Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan	Natalius Pigai Menteri HAM	Arifatul Choiri Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Budiman Sudjatmiko Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi
				
9,47%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%

Prabowo Subianto

mendapatkan rapor

5
dari 10



Gibran Rakabuming Raka

mendapatkan rapor

3
dari 10



Janji Politik Setengah Hati

74%

Responden melihat janji politik hanya beberapa yang berhasil sementara sebagian lainnya tidak terlaksana

Capaian Program Masih Belum Optimal

39%

Responden menilai pencapaian program buruk sepanjang 100 hari

Rencana Kebijakan Tak Sesuai Kebutuhan Publik

36%

Responden menilai rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik

Kualitas Kepemimpinan Relatif Rendah

38%

Responden melihat rendahnya kualitas kepemimpinan dalam kabinet

Tata Kelola Anggaran Mengecewakan

52%

Responden yang menilai buruk tata kelola anggaran dalam kabinet

Lintas Lembaga Tak Serasi

46%

Responden melihat kolaborasi antar kementerian dalam kabinet tak efektif

Sektor Ekonomi Minim Intervensi

31%

Responden melihat rendahnya intervensi di sektor ekonomi

Rombak dan Geser Menteri

88%

Responden menyetujui pergantian atau pergeseran menteri dalam tugas yang berbeda

Momen Ideal Melakukan Reshuffle

6 bulan pertama

Sebanyak 48% responden menyepakati reshuffle pada 6 bulan pertama pemerintahan (20 April 2025)

Reformasi TNI belum selesai

5 dari 10

Responden menilai perlu evaluasi dan peningkatan kepercayaan TNI

Kinerja POLRI Jauh dari Presisi

4 dari 10

Publik Menuntut Transparansi dan Profesionalisme POLRI

1 Latar Belakang

Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, harapan masyarakat juga dibayangi oleh skeptisisme publik. Apakah duet ini mampu mewujudkan janji kampanye mereka? Apakah kebijakan yang mereka hasilkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, atau hanya kosmetik politik belaka? 100 hari pertama bukan sekadar angka, melainkan penanda awal untuk mengukur arah kebijakan, keberanian mengambil keputusan strategis, dan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja 100 hari kabinet Prabowo-Gibran menjadi kebutuhan mendesak untuk menakar sejauh mana arah pemerintahan ini sudah berjalan.

Studi ini bertujuan untuk menyajikan analisis, mengupas berbagai capaian, tantangan, dan potensi perbaikan kabinet baru ini. Dalam 100 hari pertama ini, sebenarnya kita sudah mulai dapat mengukur mana menteri yang betul-betul bekerja untuk rakyat dan menteri yang justru memungguni hak-hak publik. Harapannya, studi sederhana ini dapat menjadi tolok ukur awal yang tidak hanya mendiagnosis kinerja, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk masa depan. Sebab, 100 hari pertama bukanlah akhir, melainkan pondasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan Indonesia era Prabowo-Gibran.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup evaluasi kinerja kabinet secara keseluruhan, dengan fokus pada:



Identifikasi menteri dengan kinerja terbaik dan terburuk berdasarkan indikator keberhasilan program kerja.



Analisis tingkat kolaborasi dan sinergi antar kementerian dalam mendukung agenda nasional.



Penilaian terhadap sektor-sektor yang belum diintervensi secara efektif oleh kabinet, beserta tantangan dan peluang perbaikannya.

2 Metodologi Penelitian

Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para menteri yang memberikan dampak signifikan bagi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama. Pada saat yang sama, memberikan evaluasi pada menteri yang gagal dan belum maksimal, agar bisa bekerja lebih baik lagi. Metodologi Penilaian Kinerja 100 hari Kabinet Prabowo-Gibran menggunakan survey berbasis *expert judgment*. Panel juri terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dari beragam media massa baik elektronik, dan cetak. Setiap panelis memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keberagaman panelis memastikan bahwa penilaian mencakup berbagai perspektif.

Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk melaporkan secara objektif, terperinci, dan kritis tentang kebijakan pemerintah serta implementasinya. Jurnalis juga memiliki pengalaman dalam mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. Karena profesi mereka mengharuskan mereka untuk mencari fakta, memverifikasi informasi, dan memberikan laporan yang akurat dan tidak bias, mereka dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan independen. Peran para jurnalis dalam dunia media massa juga memungkinkan mereka untuk memperhatikan pergeseran kebijakan, mendalami dampak kebijakan terhadap publik, serta melihat kinerja menteri dari sudut pandang yang lebih luas dan transparan. Para jurnalis juga melaporkan kinerja pemerintah berdasarkan ulasan dari para akademisi, pakar dan persepsi publik. Intensitas yang tinggi dalam mengulas informasi kinerja pemerintahan dapat memastikan bahwa penilaian yang dilakukan mencakup berbagai perspektif yang lebih holistik.

Indikator Penilaian Kinerja 100 hari Prabowo-Gibran

1

Pencapaian Program

Penilaian ini mencakup seberapa berhasil Prabowo-Gibran dalam mencapai tujuan dan target dari program-program yang telah direncanakan. Hal ini mencakup implementasi kebijakan yang berhasil dilaksanakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

2

Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik

Penilaian juga memperhitungkan seberapa tepat kebijakan yang dirumuskan oleh menteri sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Menteri yang berhasil merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini akan mendapatkan nilai lebih.

3

Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi

Menteri yang menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang kuat, mampu memimpin tim dengan efektif, dan berkomunikasi dengan jelas mengenai kebijakan serta tujuannya, akan dihargai. Penilaian ini mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan kemampuan menteri untuk membangun dukungan bagi kebijakan yang diterapkan.

4

Tata Kelola Anggaran

Penilaian ini menilai kemampuan menteri dalam mengelola anggaran kementerian dengan efektif dan efisien. Menteri yang mampu mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal, serta menghindari pemborosan, akan mendapatkan nilai lebih.

5

Komunikasi Kebijakan

Menteri yang mampu mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan baik dan jelas terkait tujuan, tata kelola, implementasi, dan juga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi akan dihargai. Penilaian ini penting untuk mengetahui sejauh apa kemampuan menteri dalam menjaga transparansi kebijakan mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi, serta mencegah bias informasi di ranah publik.

Estimasi Kinerja Kabinet

Setiap panelis memberikan peringkat kepada tiga menteri terbaik berdasarkan kinerja mereka dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Proses ini memastikan penilaian yang adil dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, dan tata kelola anggaran. Menteri yang dipilih sebagai yang terbaik mendapat tiga poin, yang kedua dua poin, dan menteri ketiga mendapatkan satu poin. Poin menteri terbaik tersebut kemudian dikurangi jumlahnya dengan pilihan tiga menteri terburuk. Estimasi ini dilakukan secara berjenjang untuk memastikan konsistensi dan keandalan data yang diberikan.

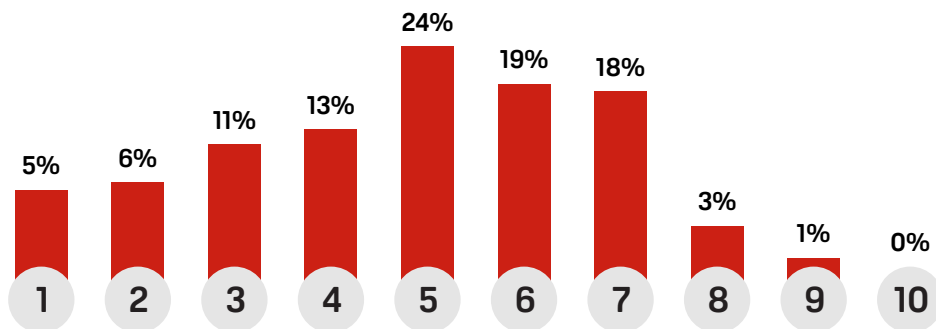
Studi ini menjangkau respon dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari *desk* berbeda diantaranya *desk* ekonomi, sosial dan politik, hukum dan ham, serta energi dan lingkungan. Validitas isi (*content validity*) maupun validitas konstruk (*construct validity*) dilakukan pada awal studi untuk memastikan pertanyaan benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Setelah data terkumpul, pemeriksaan konsistensi jawaban dilakukan untuk mendeteksi pola atau *outlier*.

3 Evaluasi Kinerja Kabinet Prabowo–Gibran

3.1. Evaluasi Kinerja Presiden dan Wakil Presiden

Penilaian Kinerja Presiden Prabowo Subianto

Kinerja Presiden Prabowo Subianto Selama 100 Hari Pertama

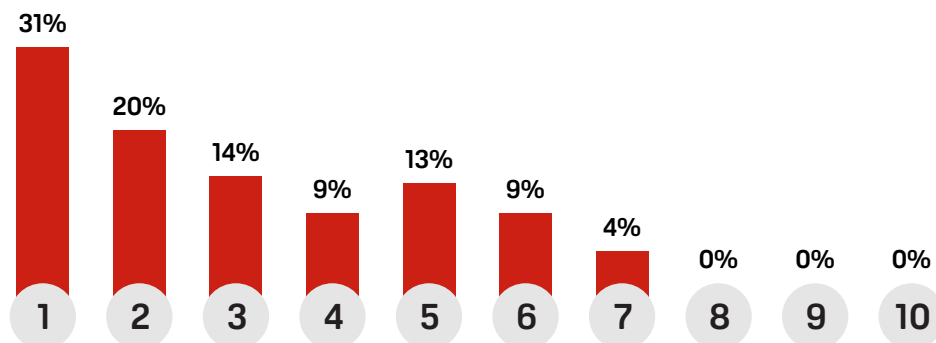


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Bagaimana Anda menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan menggunakan skala linier 1 hingga 10, semakin besar angkanya bermakna semakin positif/baik.

Kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama apabila dirata-rata mendapatkan rapor nilai 5 dari 10. Responden memberikan nilai 1 sebanyak 5%, nilai 2 sejumlah 6% responden, dan nilai 3 sebesar 11% untuk kinerja Presiden. Nilai 4 mendapatkan penilaian 13%, sedangkan mayoritas responden memilih nilai 5 yang memperoleh 24%. Sebanyak 19% responden memberikan nilai 6 dan 18% responden memberikan nilai 7. Hanya 3% responden yang menilai 8 dan 1% yang memberi nilai 9 pada kinerja Presiden Prabowo.

Penilaian Kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming

Kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Selama 100 Hari Pertama

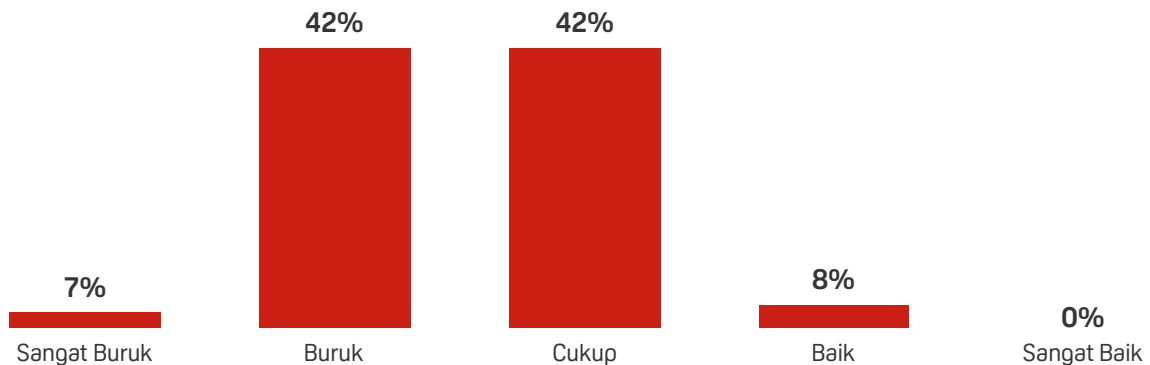


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Bagaimana Anda menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan menggunakan skala linier 1 hingga 10, semakin besar angkanya bermakna semakin positif/baik.

Kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming selama 100 hari pertama apabila dirata-rata mendapatkan rapor nilai 3 dari 10. Terlihat responden memberikan nilai 1 mendominasi penilaian yakni sebanyak 31%. Nilai 2 cukup banyak menjadi jawaban responden sejumlah 20% dan nilai 3 sebesar 14%. Nilai 4 mendapatkan jawaban 9%, nilai 5 mendapatkan 13%, dan terdapat 9% responden yang menilai Wakil Presiden 6. hanya 4 % responden memberikan nilai 7 dan tidak ada responden yang memberikan nilai memuaskan yaitu 8-10 untuk Wakil Presiden Gibran.

3.2. Evaluasi Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran

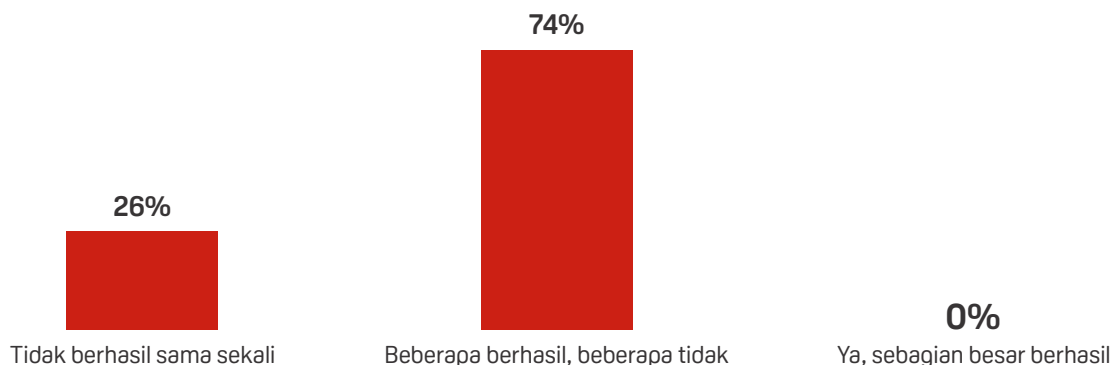
Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 Hari Pertama



Sumber: Penulis. N = 95. Responden ditanyakan “Secara keseluruhan, bagaimana Anda menilai kinerja Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan meliputi “Sangat Buruk” “Buruk” “Cukup” “Baik” dan “Sangat Baik”.

Secara keseluruhan kinerja kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan. Hal ini terungkap dari 7% responden menjawab “sangat buruk” dan 42% mengisi buruk, sedangkan hanya 42% responden yang menjawab “cukup” dan 8% responden mengisi “baik”.

Pemenuhan Janji-janji Politik dalam 100 Hari

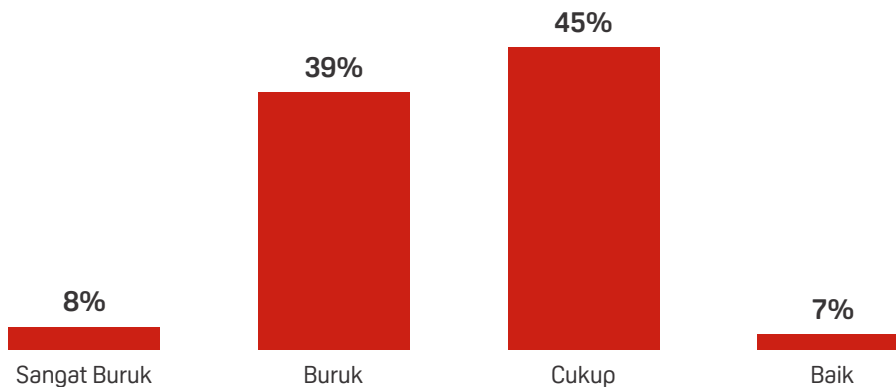


Sumber: Penulis. N = 95. Responden ditanyakan “Apakah kabinet ini berhasil dalam memenuhi janji-janji politik mereka selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan meliputi “Beberapa berhasil, beberapa tidak” “Tidak berhasil sama sekali” dan “Ya, sebagian besar berhasil”.

Dalam aspek pemenuhan janji politik, responden menjawab “beberapa berhasil, beberapa tidak berhasil” sebesar 74%. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap janji kampanye belum seluruhnya dapat terlihat pada 100 hari pertama pemerintahan.

Pencapaian Program Belum Optimal

Penilaian Pencapaian Program dalam 100 Hari

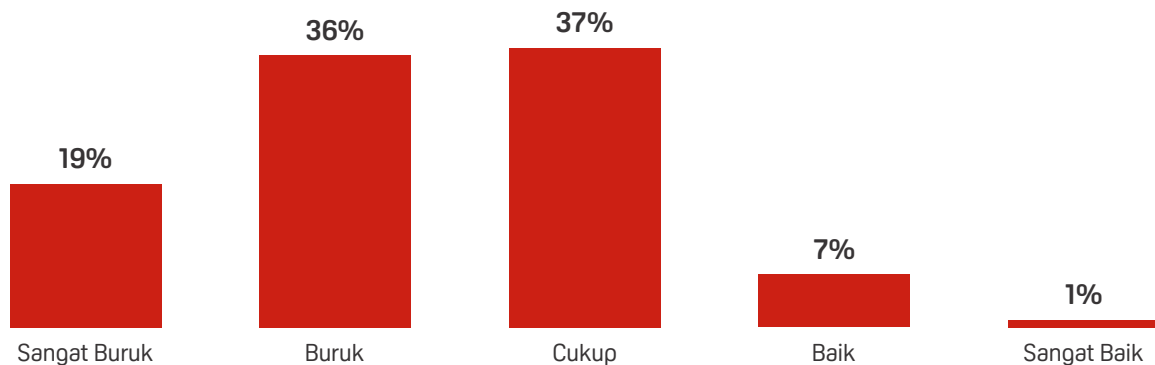


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Berikan penilaian anda untuk kinerja kabinet Prabowo-Gibran mengenai pencapaian program?”. Opsi jawaban pertanyaan meliputi “Sangat Buruk” “Buruk” “Cukup” “Baik” dan “Sangat Baik”.

Aspek pencapaian program dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran masih belum optimal. Terlihat dari sebesar 39% responden memberikan jawaban “buruk” dan 8% menjawab “sangat buruk”. Sementara terdapat 45% responden menjawab “cukup” dan 7% mengisi capaian dalam tingkat “baik”.

Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Publik Masih Perlu Ditingkatkan

Penilaian Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik dalam 100 Hari

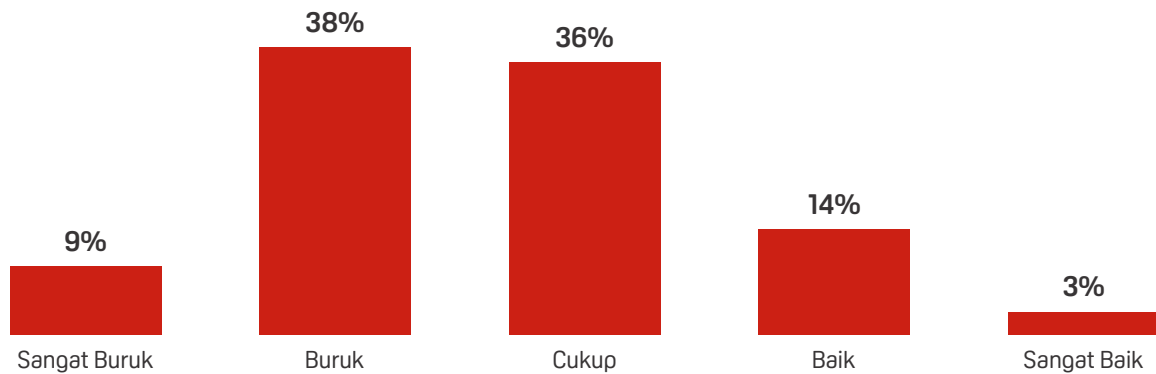


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Berikan penilaian anda untuk kinerja kabinet Prabowo-Gibran mengenai kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik?”. Opsi jawaban pertanyaan meliputi “Sangat Buruk” “Buruk” “Cukup” “Baik” dan “Sangat Baik”.

Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik menunjukkan 19% responden menilai “sangat buruk” dan menjawab “buruk” sebesar 36%. hal ini mengindikasikan rencana kebijakan yang diwacanakan selama ini masih elitis dan tidak menjawab kebutuhan publik. sementara itu, 37% responden menilai “cukup” dan 7% menjawab baik, serta sebesar 1% memilih “sangat baik”.

Kualitas Kepemimpinan Masih Menjadi Persoalan

Penilaian Kualitas Kepemimpinan dalam 100 Hari

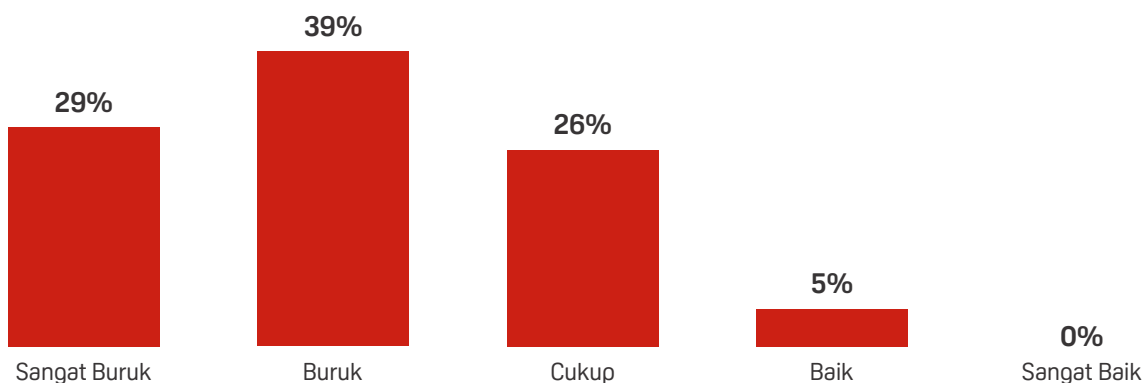


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Berikan penilaian anda untuk kinerja kabinet Prabowo-Gibran mengenai kualitas kepemimpinan?”. Opsi jawaban pertanyaan meliputi “Sangat Buruk” “Buruk” “Cukup” “Baik” dan “Sangat Baik”.

Aspek kualitas kepemimpinan dinilai “sangat buruk” oleh 9% responden dan 38% menilai “buruk”. Lalu, 36% responden menilai “cukup” dan 14% menilai “baik”. hanya 3% responden yang memberikan jawaban “sangat baik”.

Komunikasi Kebijakan Masih Buruk

Penilaian Komunikasi Kebijakan dalam 100 Hari

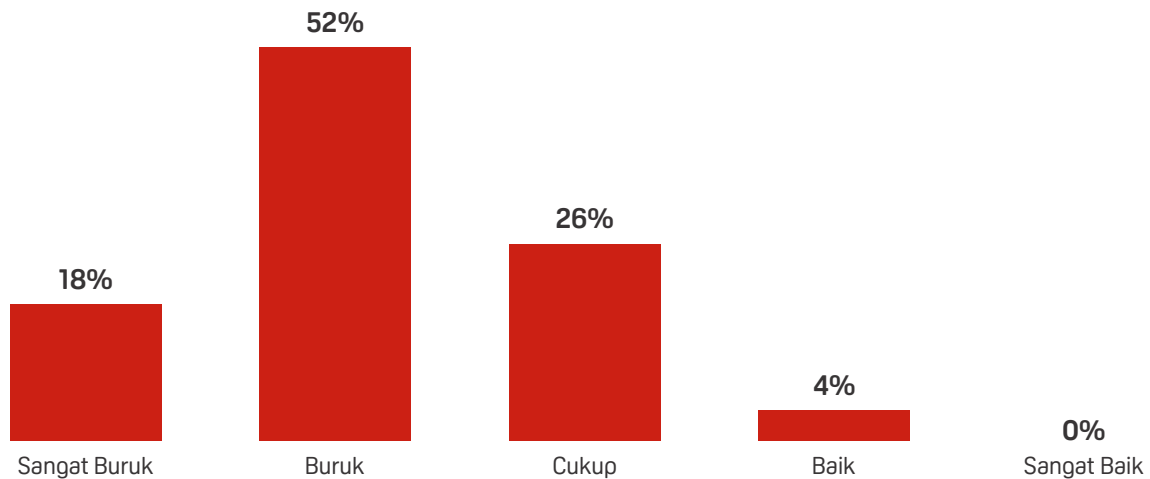


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Berikan penilaian anda untuk kinerja kabinet Prabowo-Gibran mengenai komunikasi kebijakan?”. Opsi jawaban pertanyaan meliputi “Sangat Buruk” “Buruk” “Cukup” “Baik” dan “Sangat Baik”.

Aspek komunikasi kebijakan mendapat penilaian “sangat buruk” sebesar 18% responden dan 39% menilai “buruk”. Sementara itu, 26% responden menilai “cukup” dan hanya 5% menilai “baik”.

Tata Kelola Anggaran Masih Harus Ditingkatkan

Penilaian Tata Kelola Anggaran dalam 100 Hari



Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Berikan penilaian anda untuk kinerja kabinet Prabowo-Gibran mengenai tata kelola anggaran?”. Opsi jawaban pertanyaan meliputi “Sangat Buruk” “Buruk” “Cukup” “Baik” dan “Sangat Baik”.

Tata kelola anggaran pemerintah selalu mendapat sorotan karena keterbatasan ruang fiskal dibandingkan kebutuhan anggaran yang luar biasa. Aspek tata kelola anggaran mendapatkan penilaian “sangat buruk” sebesar 18% responden dan 52% menilai “buruk”. Sementara itu, 26% responden menilai “cukup” dan hanya 4% menilai “baik”.

3.3. Evaluasi Kinerja Setiap Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

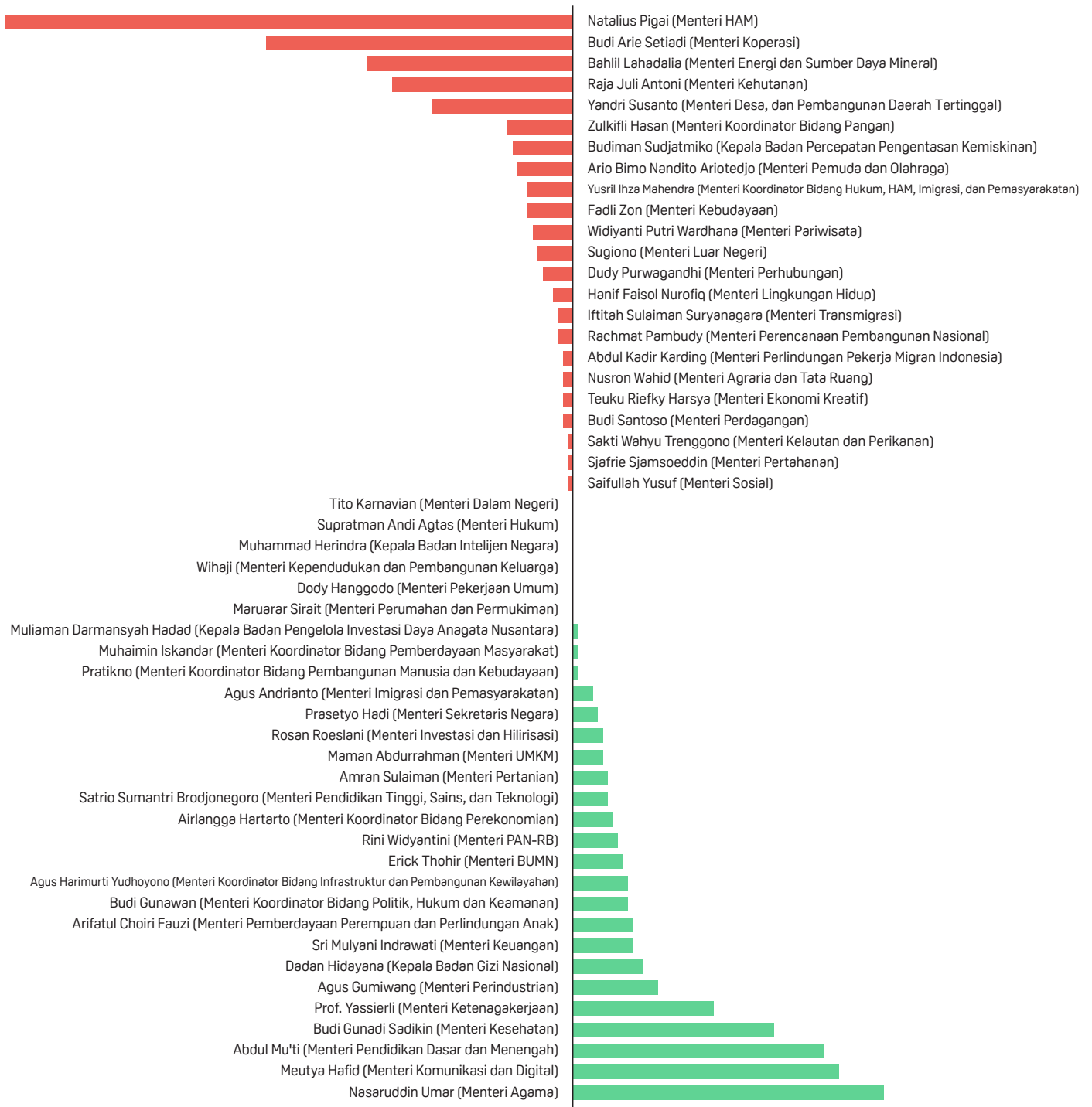
Kinerja Menteri/Kepala Badan Kabinet Merah-Putih Selama 100 Hari Pertama

Menteri dengan rapor merah



Menteri dengan rapor hijau





Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Kemudian juga ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi seluruh nama Menteri & Kepala Badan Kabinet Merah Putih masa jabatan periode 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

Evaluasi ini menggunakan sistem skoring yang mencakup rentang nilai negatif hingga positif. Menteri dengan skor lebih tinggi berada di sisi kanan, sementara yang memiliki skor lebih rendah berada di sisi kiri. Secara keseluruhan, terdapat variasi yang signifikan dalam penilaian kinerja antar-menteri.

Menteri dengan performa baik

Menteri dengan skor tertinggi dalam evaluasi ini adalah **Nasaruddin Umar (Menteri Agama)**, yang memperoleh nilai mendekati 100, mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama. Di posisi kedua, **Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital)** juga menunjukkan skor yang menonjol. Selanjutnya, **Abdul Mu'ti (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)** mencatat skor yang positif.

Menteri dengan performa buruk

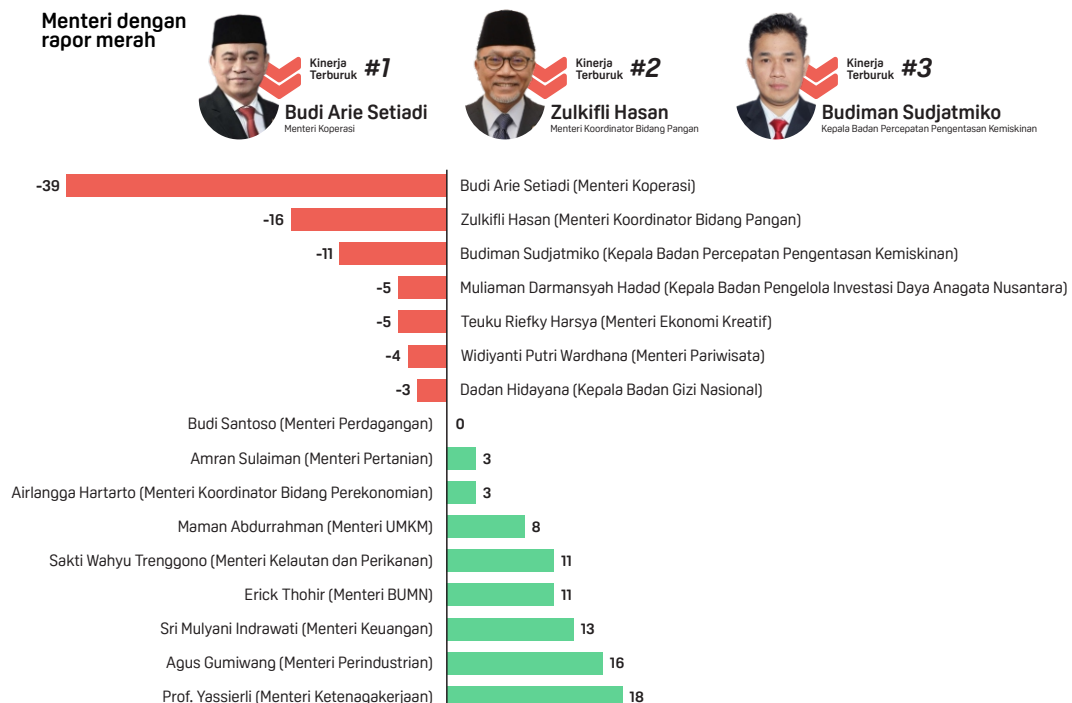
Sebaliknya, skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh **Natalius Pigai (Menteri HAM)** dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan. **Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)** menempati posisi kedua terendah dengan skor negatif. **Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)** berada di posisi ketiga terendah.

3.4. Evaluasi Kinerja Menteri Berdasarkan Sektor

Bagian ini menganalisis kinerja menteri dalam Kabinet Merah Putih, yang dibagi ke dalam empat sektor utama: Ekonomi, Lingkungan dan Energi, Sosial Politik, serta Hukum dan HAM.

Ekonomi

Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi Selama 100 Hari Pertama

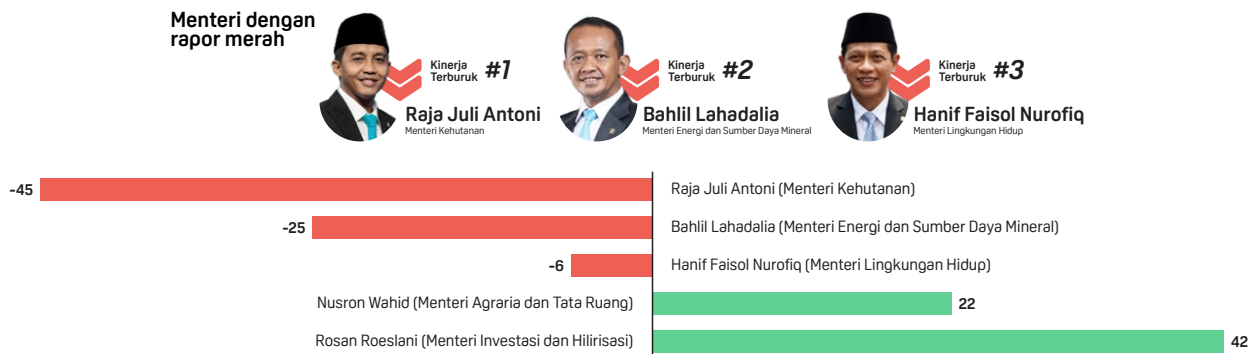


Sumber: Penulis. N = 27 expert. Responden ditanyakan "Siapa menurut Anda Menteri Bidang Ekonomi yang Paling Berhasil dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?". Kemudian juga ditanyakan "Siapa menurut Anda Menteri Bidang Ekonomi yang Paling Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?". Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Ekonomi dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

Pada posisi skor terendah, **Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)** menerima skor -39, hal ini menandakan tidak adanya terobosan dalam pengelolaan koperasi. **Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan)** memperoleh skor -16, juga tidak terlepas dari beragam program ketahanan pangan seperti food estate yang cukup kontroversial dan keterangan tidak akan impor beras, jagung, dan gula memicu keraguan publik. **Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)** mendapatkan skor -11 dipengaruhi oleh kebingungan publik antara keterangan pers dengan program riil yang akan dilakukan dalam menurunkan kemiskinan. **Muliawan Darmansyah Hadad (Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara)** memperoleh skor -5, yang menunjukkan lambannya pembentukan lembaga Danantara dan wujud persepsi negatif responden atas kebermanfaatan lembaga tersebut, termasuk kekhawatiran soal isu utang. Sementara itu, **Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif)** juga memperoleh skor -5, berkaitan dengan belum optimalnya program untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

Energi dan Lingkungan

Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Energi & Lingkungan Selama 100 Hari Pertama



Sumber: Penulis. N = 25 expert. Responden ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Bidang Energi & Lingkungan yang Paling Berhasil dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Kemudian juga ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Bidang Energi & Lingkungan yang Paling Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Energi dan Lingkungan dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

Menteri dengan skor terendah dalam evaluasi kinerja energi dan lingkungan hidup adalah **Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)** dengan nilai -45. Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi. **Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)** memperoleh skor -25, berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih (belum jelasnya pemensiunan PLTU batubara paska G20 Brasil). **Hanif Faisol Nurofiq (Menteri Lingkungan Hidup)** mencatat skor -6, yang mengindikasikan adanya rapor merah dalam penanganan isu lingkungan, seperti penanganan polusi udara, emisi karbon, dan pengelolaan limbah.

Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Sosial & Politik Selama 100 Hari Pertama

Menteri dengan
rapor merah



Kinerja
Terburuk #1

Yandri Susanto
Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal



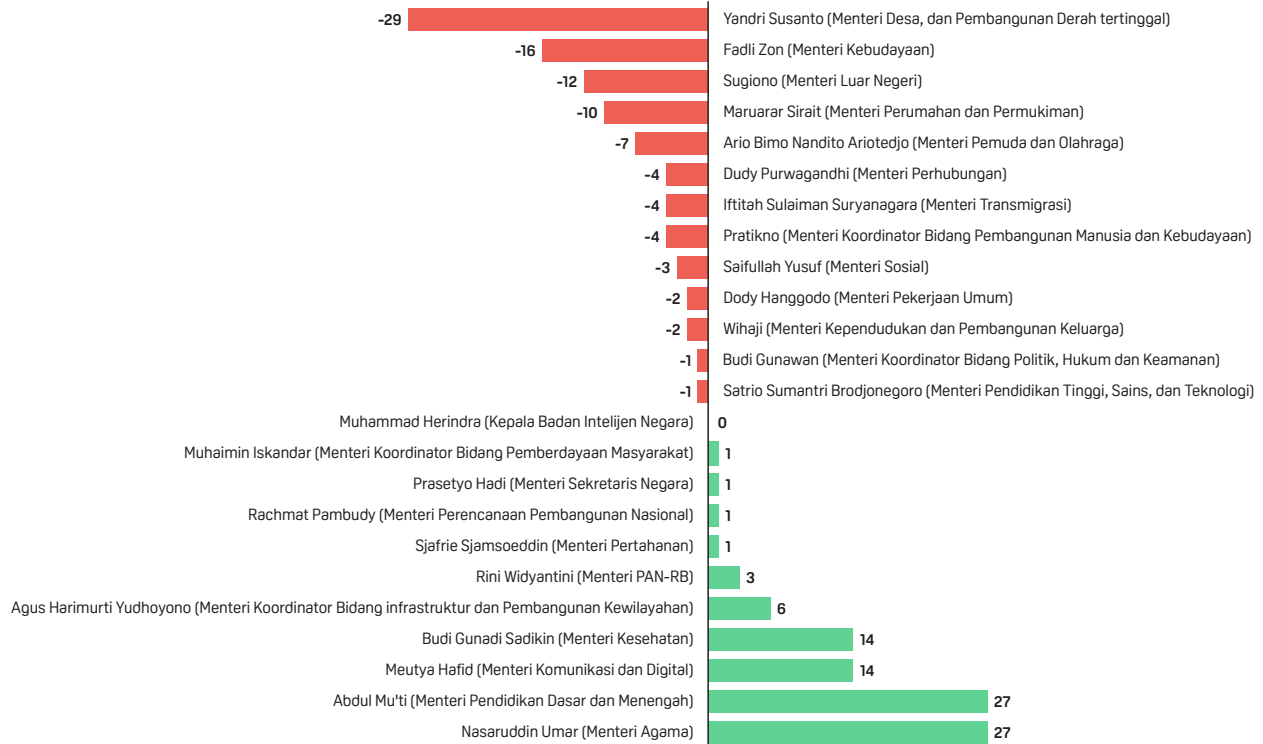
Kinerja
Terburuk #2

Fadli Zon
Menteri Kebudayaan



Kinerja
Terburuk #3

Sugiono
Menteri Luar Negeri



Sumber: Penulis. N = 23 expert. Responden ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Bidang Sosial & Politik yang Paling Berhasil dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Kemudian juga ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Bidang Sosial & Politik yang Paling Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Sosial dan Politik dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

Menteri dengan skor terendah adalah **Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)** yang mendapatkan nilai -29. Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya. **Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)** berada di urutan berikutnya dengan skor -16, sorotan atas aktivitas seni yang dianggap membatasi ruang gerak dan kebebasan berekspresi jadi sentimen kritis publik.

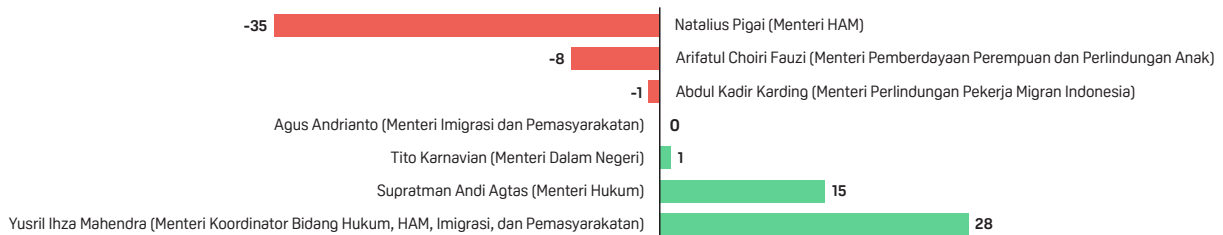
Di posisi selanjutnya, **Sugiono (Menteri Luar Negeri)** mencatat skor -12. Kinerjanya dinilai kurang efektif dalam menjaga hubungan internasional, terutama di tengah dinamika global yang membutuhkan pendekatan diplomasi lebih strategis. **Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Permukiman)**, dengan skor -10, menghadapi kritik atas progres dalam menyediakan perumahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. **Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga)** mencatat skor -7, mencerminkan ketidakpuasan

atas kebijakan pemuda dan perkembangan olahraga. Kritik serupa juga diarahkan kepada **Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)** yang dinilai tidak menunjukkan langkah-langkah konkret, serta **Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif)** yang dianggap kurang hadir dalam menjawab tantangan sektor ekonomi kreatif.

Hukum dan HAM

Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Hukum & HAM Selama 100 Hari Pertama

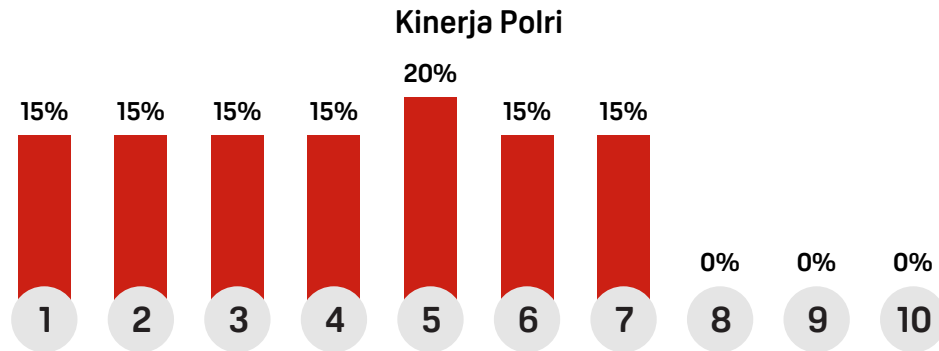
Menteri dengan
rapor merah



Sumber: Penulis. N = 20 expert. Responden ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Bidang Hukum & HAM yang Paling Berhasil dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Kemudian juga ditanyakan “Siapa menurut Anda Menteri Bidang Hukum & HAM yang Paling Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Hukum dan HAM dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

Menteri dengan skor terendah dalam evaluasi ini adalah **Natalius Pigai (Menteri HAM)**, yang mencatat nilai -35. Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respon negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain. Di posisi kedua, **Arifatul Choiri Fauzi (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)** mendapatkan skor -8. Hal ini mencerminkan ketidakhadirannya dalam merespons isu-isu penting terkait anak dan perempuan, termasuk berbagai kasus besar yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Selain itu, Arifatul juga dinilai kurang mampu memposisikan diri dalam program-program prioritas pemerintah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis). Sementara itu, **Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)** berada di posisi ketiga dengan skor -1. Evaluasi ini menunjukkan bahwa ia masih terlalu terfokus pada program administratif, sehingga kurang tanggap dalam menghadapi masalah-masalah mendesak dan faktual yang dihadapi pekerja migran Indonesia.

3.5. Evaluasi Kinerja Kepolisian

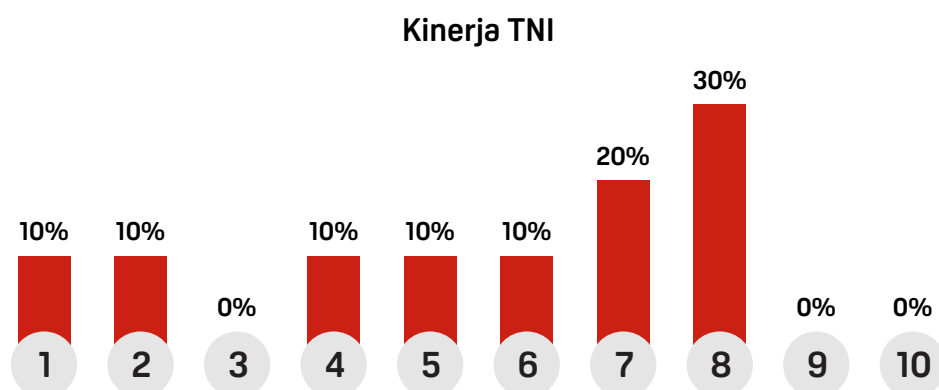


Sumber: Penulis. N = 20 expert. Responden ditanyakan “Bagaimana Anda menilai kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) saat ini?”. Opsi jawaban pertanyaan menggunakan skala linier 1 hingga 10, semakin besar angkanya bermakna semakin positif/baik.

Analisis Kinerja POLRI berdasarkan temuan survei menampilkan skor penilaian publik dalam bentuk persentase pada berbagai tingkat nilai, dari 1 hingga 10. Dalam survei ini, nilai 10 tidak secara otomatis mewakili kinerja terbaik, tetapi hanya menunjukkan skor tertinggi yang tersedia, sementara nilai lebih rendah menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda. Mayoritas responden memberikan skor 5, yang mencapai 20% dari total responden, mencerminkan penilaian di tingkat tengah. Nilai lain, seperti 1, 2, 3, 4, 6, dan 7, masing-masing memperoleh 15%, sementara tidak ada responden yang memberikan skor di atas 7. Rata-rata skor dari survei tersebut juga ada pada angka 4,45. Skor ini memberikan gambaran kuantitatif atas persepsi publik.

Sebaran penilaian yang cukup besar di tingkat rendah hingga sedang (1-7) mengisyaratkan adanya tantangan serius yang harus diatasi. Ketidakhadiran nilai di atas 7 mencerminkan ketidakpuasan publik yang signifikan terhadap POLRI. Hal ini terkait dengan isu-isu seperti transparansi, profesionalisme, dominasi POLRI dalam politik dan tindakan polisi yang represif dalam penegakan hukum melahirkan sikap kritis masyarakat terhadap institusi POLRI secara keseluruhan.

3.6. Evaluasi Kinerja TNI



Sumber: Penulis. N = 20 expert. Responden ditanyakan “Bagaimana Anda menilai kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini?”. Opsi jawaban pertanyaan menggunakan skala linier 1 hingga 10, semakin besar angkanya bermakna semakin positif/baik.

Mayoritas responden memberikan nilai 8, yang mencapai 30% dari total responden, diikuti oleh nilai 7 dengan 20%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap kinerja TNI dalam melaksanakan tugasnya. Namun, angka yang tinggi untuk nilai 7 dan 8 juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan agar institusi ini bisa mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Jika dihitung rata-rata nilainya sebesar 5,6.

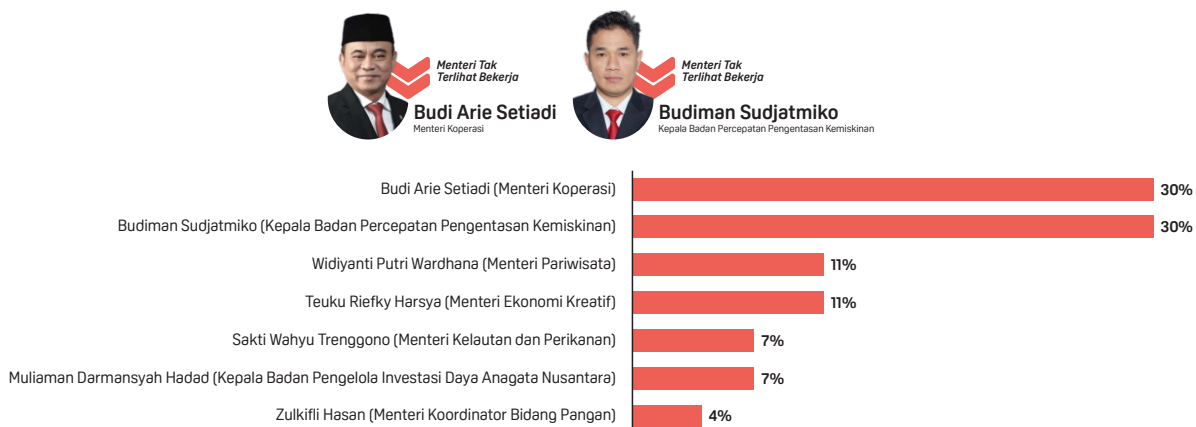
Nilai yang lebih rendah, meskipun hanya sebesar 10% untuk masing-masing kategori, mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja TNI. Kritik ini berkaitan dengan beberapa isu seperti, TNI yang aktif pada jabatan sipil, keterlibatan pada proyek atau program strategis nasional (PSN) *food estate*, dan tingginya intensitas keterlibatan aktif TNI pada program Makan Bergizi Gratis.

4 Resolusi Perbaikan Kinerja Kabinet

Hasil temuan survei membuktikan bahwa miskordinasi, program yang tidak dirasakan masyarakat, komunikasi buruk dan kinerja individu menteri yang kurang profesional banyak terjadi di tubuh kabinet merah putih Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Berikut hasil dari deretan menteri atau kepala badan yang dianggap tidak terlihat bekerja.

Menteri yang Tidak Terlihat Bekerja Harus Dievaluasi Ulang

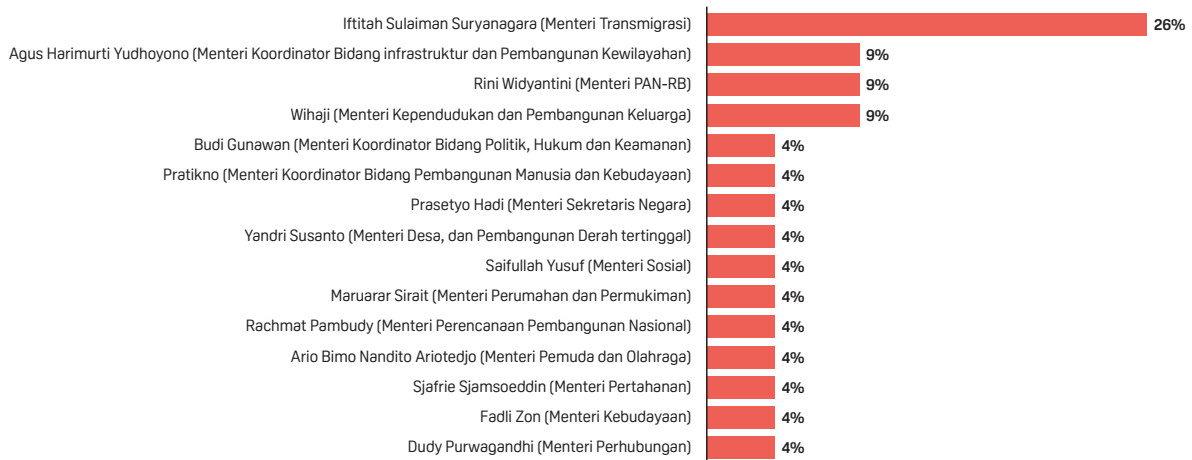
Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi yang Tak Terlihat Bekerja



Sumber: Penulis. N = 27 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Ekonomi yang tidak terlihat bekerja sama sekali dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Ekonomi dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029.

30% responden menilai **Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)** tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan. Keterlibatan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi. Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG. Kemudian 30% responden menilai **Budiman Sudjatmiko** tidak terlihat bekerja selama menjabat sebagai Kepala Badan. Faktanya belum ada rencana program maupun kebijakan spesifik untuk mengatasi masalah kemiskinan sejak menjabat di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

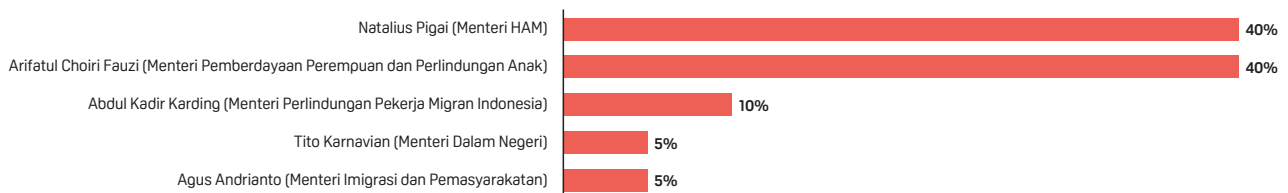
Menteri/Kepala Badan di Bidang Sosial & Politik yang Tak Terlihat Bekerja



Sumber: Penulis. N = 23 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Sosial dan Politik yang tidak terlihat bekerja sama sekali dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Sosial dan Politik dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029.

Menteri Transmigrasi (**Ifitah Sulaiman Suryanagara**) mendapatkan penilaian terbanyak sebagai menteri di bidang sosial dan politik yang tidak terlihat bekerja dari 26% responden. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, tidak ada terobosan berarti untuk mengatasi tantangan utama sektor transmigrasi. Terutama terhadap masalah relokasi penduduk terdampak akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan konflik agraria.

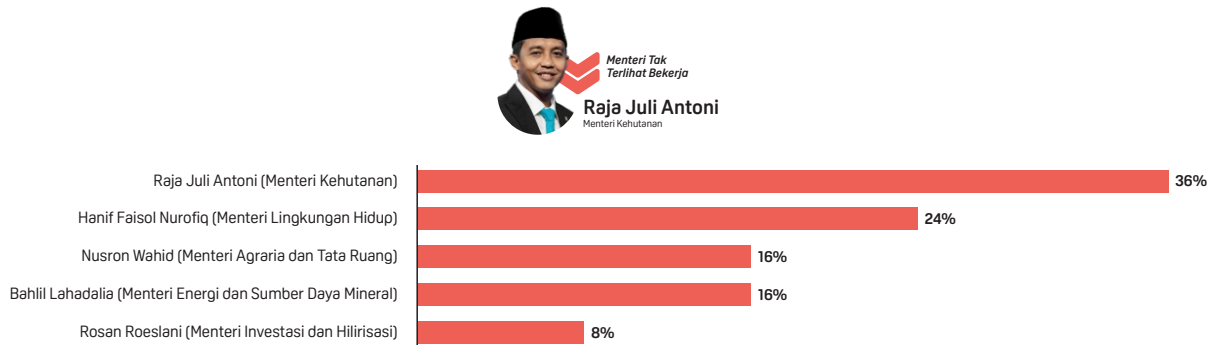
Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Hukum & HAM yang Tak Terlihat Bekerja



Sumber: Penulis. N = 20 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Hukum dan HAM yang tidak terlihat bekerja sama sekali dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Hukum dan HAM dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029.

Menteri Hak Asasi Manusia (**Natalius Pigai**) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (**Arifatul Choiri Fauzi**) masing-masing dinilai tidak terlihat bekerja oleh total 80% responden. Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. Sementara angka kejahatan HAM, kekerasan terhadap anak, dan diskriminasi terhadap perempuan semakin tinggi terutama di daerah konflik.

Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Energi & Lingkungan yang Tak Terlihat Bekerja

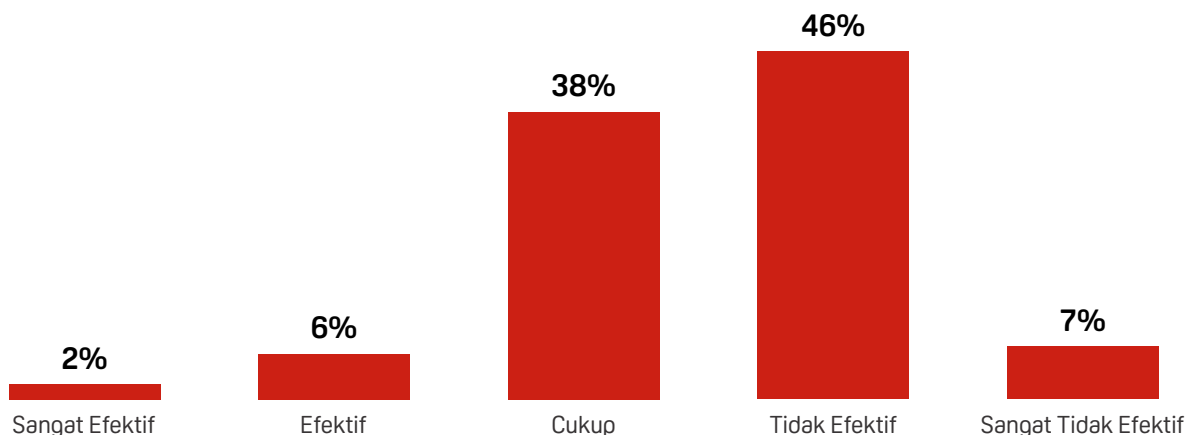


Sumber: Penulis. N = 25 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Energi dan Lingkungan yang tidak terlihat bekerja sama sekali dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Energi dan Lingkungan dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029.

Terdapat 5 menteri yang dinilai oleh responden tidak terlihat bekerja. Bahkan cenderung kontroversial terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Mulai dari Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) hingga Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi). Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia. Tercermin dari meningkatnya angka deforestasi akibat program alih fungsi lahan yang lebih berorientasi terhadap kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi bencana ekologis di masa mendatang. Ditambah transisi energi juga masih didominasi solusi palsu yang dinilai dapat menekan emisi karbon akan tetapi meningkatkan jenis emisi yang lebih berbahaya disaat yang bersamaan. Kebijakan investasi dan hilirisasi juga masih terfokus pada sektor ekstraktif yang dinilai memiliki nilai tambah semu bagi perekonomian.

Kolaborasi Antar Kementerian Harus Ditingkatkan

Efektivitas Kolaborasi Antar Kementerian dalam Kabinet Prabowo-Gibran

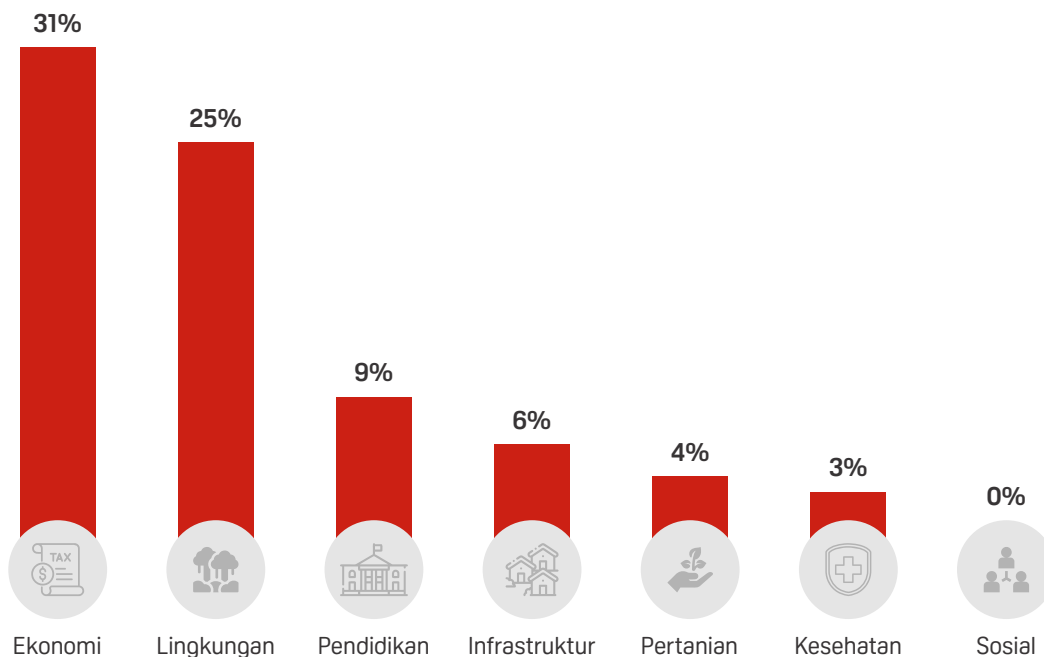


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Bagaimana Anda menilai efektivitas kolaborasi antar kementerian dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban meliputi “Sangat Tidak Efektif” “Tidak Efektif” “Cukup” “Efektif” “Sangat Efektif”

46% responden menilai kolaborasi antar kementerian tidak efektif. Tercermin dari pelaksanaan program yang sering mengalami tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Sehingga sering terjadi inkonsistensi dalam implementasi kebijakan di lapangan seperti manajemen implementasi yang terus berubah-ubah terkait program Makan Bergizi Gratis.

Prioritas Perbaikan di Sektor Ekonomi dan Lingkungan

Sektor Yang Belum Diintervensi dalam 100 Hari

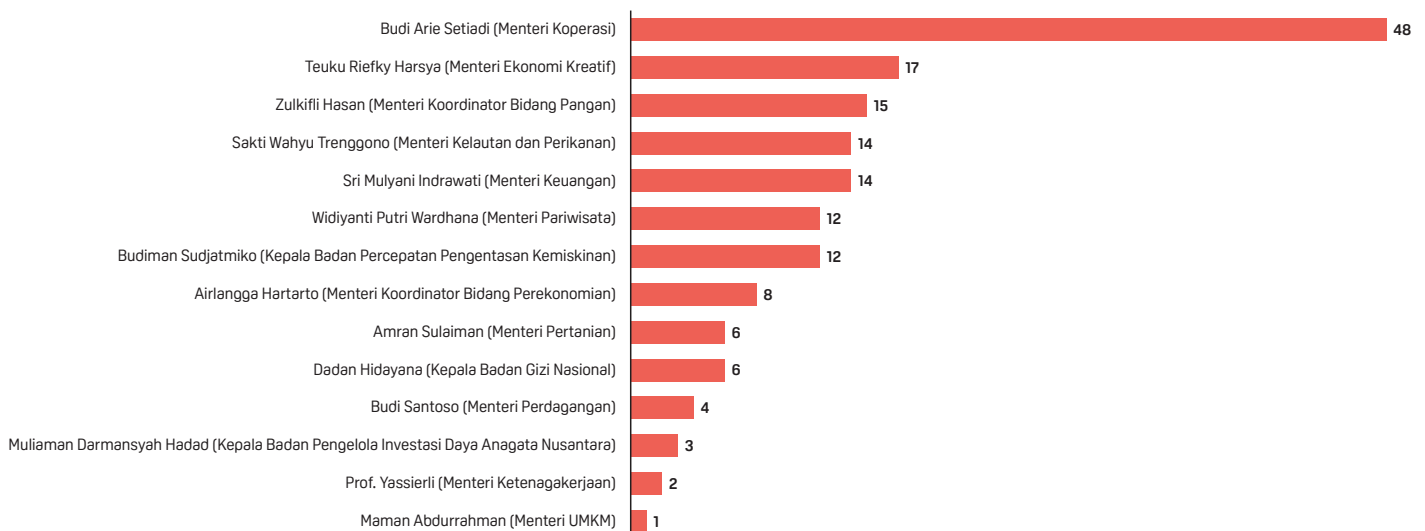


Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Sektor apa saja yang menurut Anda masih belum diintervensi dengan baik oleh Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban meliputi “Ekonomi” “Kesehatan” “Pendidikan” “Infrastruktur” “Pertanian” dan “Lingkungan”

31% responden menjawab sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum diintervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHK di sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi. Sementara 25% menjawab lingkungan hidup merupakan sektor yang paling sedikit diintervensi dari sisi kebijakan. Rencana pembukaan lahan 20 juta hektar hutan untuk ketahanan energi dan pangan, serta komitmen penutupan PLTU batubara yang belum memiliki rencana teknis menjadi sorotan utama.

Menteri dengan Kinerja Buruk Harus Di-reshuffle

Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi yang Perlu di-reshuffle dalam 6 Bulan Pertama



Sumber: Penulis. N = 27 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Ekonomi yang sebaiknya direshuffle dalam 6 bulan pertama Kabinet Prabowo-Gibran?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Ekonomi dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Sosial & Politik yang Perlu di-reshuffle dalam 6 Bulan Pertama



Rekomendasi di-reshuffle

Yandri Susanto

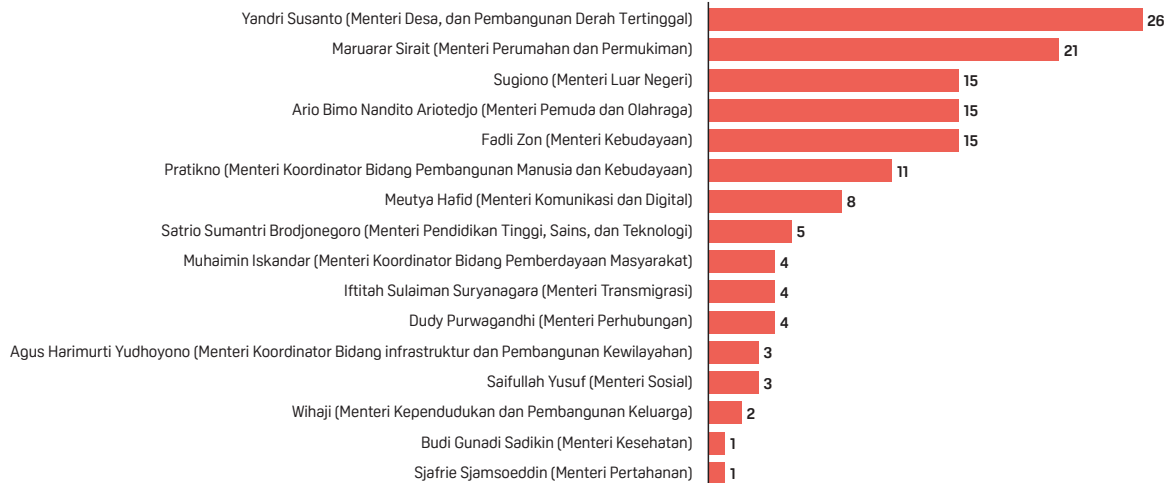
Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Rekomendasi di-reshuffle

Maruarar Sirait

Menteri Perumahan dan Permukiman



Sumber: Penulis. N = 23 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Sosial dan Politik yang sebaiknya direshuffle dalam 6 bulan pertama Kabinet Prabowo-Gibran?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Sosial dan Politik dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

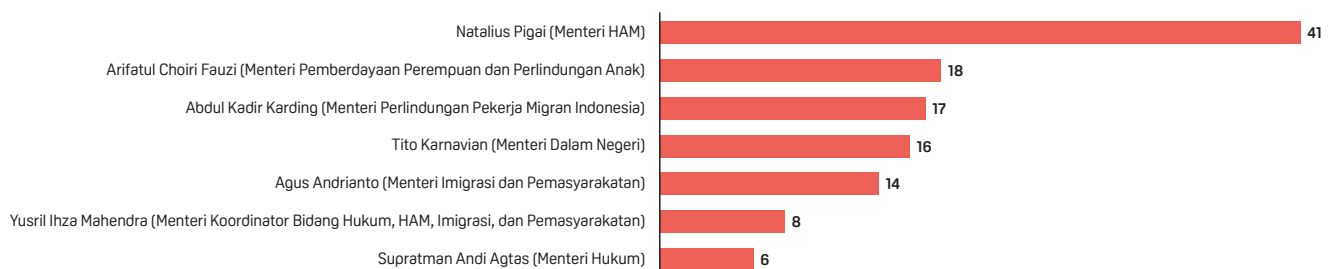
Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Hukum & HAM yang Perlu di-reshuffle dalam 6 Bulan Pertama



Rekomendasi di-reshuffle

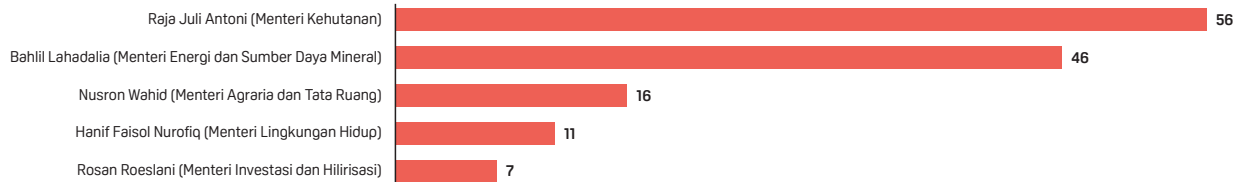
Natalius Pigai

Menteri HAM



Sumber: Penulis. N = 20 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Hukum dan HAM yang sebaiknya direshuffle dalam 6 bulan pertama Kabinet Prabowo-Gibran?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Hukum dan HAM dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

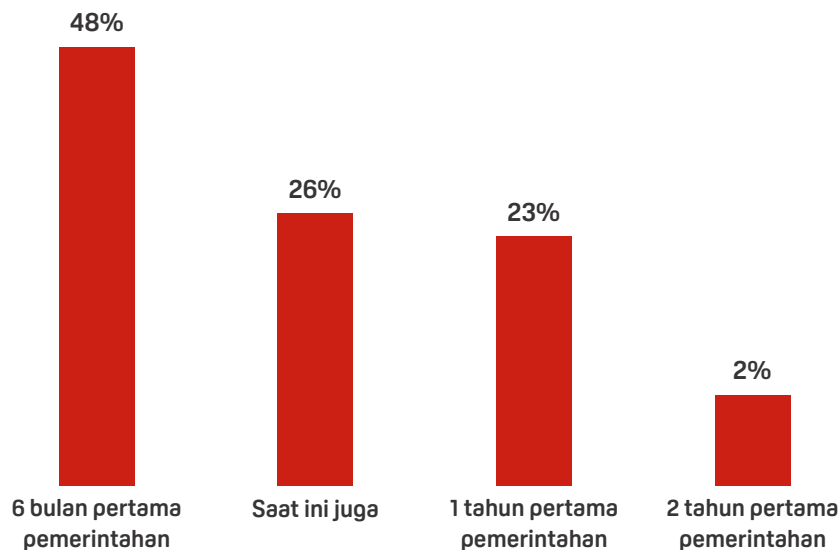
Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Energi & Lingkungan yang Perlu di-*reshuffle* dalam 6 Bulan Pertama



Sumber: Penulis. N = 27 expert. Responden ditanyakan “Menurut Anda, siapa menteri bidang Energi dan Lingkungan yang sebaiknya direshuffle dalam 6 bulan pertama Kabinet Prabowo-Gibran?”. Opsi jawaban pertanyaan tersebut meliputi beberapa nama Menteri & Kepala Badan bidang Energi dan Lingkungan dalam Kabinet Merah Putih periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, jawaban diurutkan dalam pemeringkat 1,2, dan 3.

Reshuffle harus Dilakukan Setidaknya pada 6 Bulan Pemerintahan

Momen terbaik Prabowo-Gibran melakukan *reshuffle* kabinet



Sumber: Penulis. N = 95 expert. Responden ditanyakan “Menurut anda, kapan sebaiknya Prabowo-Gibran melakukan reshuffle kabinet?”. Opsi jawaban meliputi “Saat ini juga” “6 bulan pertama pemerintahan” “1 tahun pertama pemerintahan” “2 tahun pertama pemerintahan” “3 tahun pertama pemerintahan” “4 tahun pertama pemerintahan” “Tidak perlu reshuffle”

Reshuffle atau perombakan kabinet ideal dilakukan pada 6 bulan pertama atau bertepatan dengan 20 April 2025. Sementara opsi kedua atau 26% responden menjawab saat ini juga atau bertepatan dengan evaluasi 100 hari Prabowo-Gibran. Sisanya menjawab 1 tahun pertama, dan 2 tahun pertama pemerintahan.



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl Abuserin, Kel. Gandaria Selatan,
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id